



SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA**

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya, kegiatan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dapat diselesaikan.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan uraian tentang upaya pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko, yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi untuk mengendalikan risiko. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam proses mitigasi risiko serta memastikan implementasi yang berkelanjutan.

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian mengacu kepada 5 (lima) unsur pengendalian intern. Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil pemetaan, penilaian, atau evaluasi atas sistem pengendalian intern yang ada, dengan memperhatikan struktur dan praktik tata kelola organisasi.

Diperlukan komitmen dari semua pihak yang terkait untuk melaksanakan rekomendasi yang muncul dalam Laporan Rencana Tindak Pengendalian Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan Rencana Tindak Pengendalian ini, kami mengucapkan terima kasih.

Kami berharap agar Rencana Tindak Pengendalian ini bermanfaat dan memiliki kontribusi konkrit bagi upaya pencapaian tujuan organisasi.

Purbalingga, 31 Januari 2025

**INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**



ATO SUSANTO, AP, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740706 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I GAMBARAN UMUM.....	1
A. Pendahuluan	1
B. Sekilas tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	5
BAB II PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN	10
A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini.....	10
B. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian	11
BAB III PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) ...	13
A. Penetapan Konteks	13
B. Hasil Identifikasi Risiko	21
C. Hasil Analisis Risiko.....	21
D. Pengendalian yang Sudah dilakukan	22
E. Pengendalian yang masih dibutuhkan	24
F. Rancangan Informasi dan Komunikasi.....	25
G. Rancangan Pemantauan	25
BAB IV PENUTUP	27

BAB I

GAMBARAN UMUM

A. Pendahuluan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, Gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Selanjutnya sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam menyelenggarakan SPIP telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar, yaitu :

1. efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
2. keandalan pelaporan keuangan;
3. pengamanan aset negara; dan
4. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Konsep pengendalian intern tersebut menjadi panduan minimal bagi instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam merancang pengendalian intern di sektor pemerintahan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP. Sistem Pengendalian Intern yang dibangun akan efisien dan efektif jika dirancang dengan tepat. Untuk itu perlu disusun langkah-langkah dan perencanaan strategis sebagai upaya mengintegrasikan SPIP ke dalam kegiatan dan tindakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga

1. Latar Belakang

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yang telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi serta guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang akan menjadi acuan

penyelenggaraan SPIP terintegrasi dalam melaksanakan setiap aktivitas/kegiatan dilingkungan Inspektorat Daerah.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan kebijakan yang dibuat sebagai upaya membangun pengendalian yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang teridentifikasi. RTP diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJMD, Renstra, Renja, maupun Perjanjian Kinerja.

2. Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga

a. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga disebutkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga adalah unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pengawasan yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga terdiri dari:

- a) Inspektur
- b) Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Koordinator Perencanaan
 - 2) Sub Bagian Analisis dan Evaluasi
 - 3) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
- c) Inspektur Pembantu Wilayah I
- d) Inspektur Pembantu Wilayah II
- e) Inspektur Pembantu Wilayah III
- f) Inspektur Pembantu Khusus
- g) Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Inspektorat membawahi 2 Sub bagian dan 1 Sub Koordinator Perencanaan yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub bagian yaitu Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi dan Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan serta Kelompok Jabatan Fungsional Perencana.

3 (tiga) orang Inspektur Pembantu Wilayah dan 1 (satu) orang Inspektur Pembantu Khusus yang merupakan unsur pelaksana

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah dan OPD tertentu berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

Kelompok jabatan fungsional pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD).

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 46 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat, Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah..

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. pelaksanaan pengawasan atas pengaduan masyarakat;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi.
- g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- h. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Inspektorat Daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya..

3. Dasar Hukum

Rencana Tindak Pengendalian ini disusun berdasarkan pada :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah

- d. Peraturan Badan Pengawasan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintahan Daerah.
- e. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- f. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;

4. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana Tindak Pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.

5. Ruang Lingkup

Rencana Tindak Pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkatan manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.

6. Manfaat

Keberadaan Rencana Tindak Pengendalian ini diarahkan untuk menjadi landasan/dasar dalam hal :

- a. Pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari;
- b. Sebagai dasar dalam membangun instrument pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;

- c. Pendokumentasian, pemantauan, dan pengukuran perkembangan/ progres penyelenggaraan SPIP.

B. Sekilas tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

1. Pengertian

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, merupakan salah satu kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan negara yang dimaksudkan untuk menjadi standar pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, sehingga pengelolaan keuangan negara menjadi efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan konsep pengendalian yang dirancang untuk dapat diimplementasikan secara integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Definisi SPIP di atas dipahami oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/daerah yang diamanatkan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

2. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

3. Unsur-Unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut yaitu:

1) Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu organisasi yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Oleh karena itu, setiap organisasi wajib menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif agar sistem pengendalian intern dapat terimplementasi secara efektif.

Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang dapat mendorong tercapainya pengendalian intern yang efektif, perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2) Penilaian risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi risiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko organisasi serta analisis risiko untuk menentukan pengaruh risiko yang telah teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Penilaian risiko merupakan bagian yang integral dan terpadu dari proses pengelolaan risiko (yang meliputi identifikasi dan analisis risiko) serta sistem pengendalian intern, dengan tujuan untuk :

- a. Mengidentifikasi dan menguraikan seluruh risiko potensial, baik yang disebabkan faktor internal maupun disebabkan faktor eksternal;
- b. Memeringkat risiko teridentifikasi berdasarkan level keutamaan prioritas perhatian dan penanganannya agar dapat dikelola secara efektif.

Pelaksanaan proses penilaian risiko dilakukan dalam tiga tahap kegiatan, yang terdiri atas :

- a. Penetapan tujuan organisasi, sebagai target terukur yang mengarahkan organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Pernyataan tujuan harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu;
- b. Identifikasi risiko untuk menghasilkan suatu gambaran peristiwa yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan aktivitas organisasi. Dalam pelaksanaan proses identifikasi risiko, perlu diperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa risiko;
- c. Analisis risiko untuk mengestimasi besaran kemungkinan munculnya peristiwa risiko dan dampak yang ditimbulkan terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi apabila peristiwa risiko tersebut benar-benar terjadi, serta menetapkan level atau status risiko sebagai kombinasi hubungan antara kemungkinan dan dampak risiko.

3) Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang dipandang tepat untuk dilakukan dalam rangka mengatasi risiko. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian, juga ditetapkan dan dilaksanakan kebijakan serta prosedur, guna memastikan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko telah bekerja secara efektif. Kegiatan pengendalian yang perlu dilaksanakan organisasi ditentukan berdasarkan hasil penilaian risiko dengan mempertimbangkan kecukupan pengendalian *existing*.

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu *prevention* dan *mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

4) Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan

fungsi organisasi. Pimpinan organisasi dan seluruh jajaran manajemen harus mendapatkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, yang diperoleh melalui proses identifikasi dan distribusi dalam bentuk dan waktu yang tepat, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi yang perlu dikelola adalah informasi dan komunikasi yang dapat mengintegrasikan pelaksanaan komponen-komponen SPIP secara efektif, terutama yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan organisasi serta berhubungan dengan pengelolaan risiko dan pelaksanaan aktivitas pengendalian.

5) Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

Pemantauan pengendalian intern mencakup kegiatan penilaian atas desain dan pelaksanaan pengendalian intern, serta menghasilkan usulan tindakan perbaikan terhadap kualitas sistem pengendalian intern, yang dilaksanakan melalui tiga jenis kerangka pemantauan, yaitu Pemantauan Berkelanjutan, Evaluasi Terpisah, dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit. Untuk terwujudnya penyelenggaraan SPIP yang efektif, maka seluruh unsur SPIP tersebut harus diterapkan secara terintegrasi dengan aktivitas organisasi, agar mampu mencegah timbulnya kegagalan dan ketidakefisienan dalam pencapaian tujuan organisasi.

4. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/WaliKota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN/APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan. Pernyataan

sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

BAB II

PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan SPIP. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Pembangunan lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga bertujuan untuk :

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif;
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

Berdasarkan hasil penilaian Kondisi Lingkungan Pengendalian Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga secara umum cukup memadai. Penilaian terhadap kondisi lingkungan pengendalian dilakukan dengan Hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga diperoleh gambaran sebagai berikut :

Tabel 2.1

Hasil Survei Persepsi

No	Sub. Unsur	Kondisi
1.	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen Terhadap Kompetensi	Memadai
3	Kepemimpinan Yang Kondusif	Memadai
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan SDM	Memadai
7	Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif	Kurang Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik Dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

Dari 8 (delapan) sub unsur pada Lingkungan Pengendalian tersebut di atas masih terdapat kelemahan-kelemahan pada sub unsur peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang efektif. Hal ini dapat dilihat berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga

Tahun 2024 serta Laporan Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 dimana terdapat kelemahan berupa :

- a. Masih terdapat temuan atas LHP BPK terkait Pengamanan Aset Daerah yang masih berulang atau belum tuntas
- b. Pemantauan atas RTP belum dilakukan secara berkala/periodik, sebagian besar sebatas jika ada instruksi/arahan. Penilaian risiko fraud belum sepenuhnya menghasilkan peta risiko korupsi
- c. Pelaksanaan Audit Ketaatan (*Compliance Audit*) belum sepenuhnya menyusun/ mengembangkan langkah kerja pengawasan yang mempertimbangkan risiko-risiko strategis yang ada pada objek pengawasan
- d. Jasa Konsultasi yang diberikan Inspektorat belum seluruhnya mengarah pada pembinaan kepada perangkat daerah yang masih memiliki tingkat kematangan MR yang rendah maupun perangkat daerah yang belum memiliki Register Risiko/Profil Risiko, sehingga layanan konsultasi belum mampu memberikan perbaikan terhadap pengelolaan risiko di Lingkungan Pemkab Purbalingga

B. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (*Control Environment Evaluation*), kelemahan-kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu mendapat prioritas untuk diperbaiki, yaitu:

Tabel 2.1
Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

No	Sub Unsur/Rencana Tindak Pengendalian	Penanggungjawab	Waktu Pelaksanaan
1.	Perwujudan Peran APIP yang Efektif		
	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Aset, Persediaan, dan Kas Opname pada Perangkat Daerah	Irbawil 1, 2, 3	Januari 2025
	Reviu Rencana Tindak Pengendalian OPD Tahun 2025 dan Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 2024	Irbawil 1, 2, 3	Maret 2025
	Pendampingan Penilaian Risiko Kecurangan	Irbansus	Januari 2025
	Reviu Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Tahun 2025	Irbawil 1,2, 3 dan Irbansus	Triwulan II dan III
	Peningkatan Kapasitas SDM APIP dengan melaksanakan Diklat, Bimtek dan Inhouse Training	Sekretaris	Semester 1 dan 2

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I:

- Form 1.a : Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern Control Environment Evaluation (CEE)*
- Form 1.b : CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Inspektorat Daerah Purbalingga*
- Form 1.c Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Inspektorat Daerah Purbalingga*

BAB III

PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

A. Penetapan Konteks

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pada prinsipnya, konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan (strategis) pemerintahan daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatannya, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- 1) Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah (disusun pada tingkat pemda);
- 2) Pengelolaan risiko strategis OPD; dan
- 3) Pengelolaan risiko operasional/kegiatan OPD.

Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 yang didalamnya memuat Visi Misi yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2021-2026 yaitu ***“Purbalingga Yang Mandiri Dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia”*** dengan misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT/Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;

6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa;
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah/infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan

Mendasari pada visi dan misi tersebut, Inspektorat Daerah merupakan instansi yang memiliki peran strategis dan penting dalam pelaksanaan pemerintahan. Inspektorat berperan dalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*). Sehingga Inspektorat sangat erat kaitannya dengan pencapaian misi pertama yaitu mewujudkan tata pemerintahan yang baik yang mengarah pada upaya menyelenggarakan pemerintahan yang semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sebagai upaya mencapai misi tersebut, penetapan Konteks Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

1. Risiko Strategis Inspektorat Daerah

Tabel 3.1
Penetapan Konteks Strategis

Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan :		
	1. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga		
	2. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		
	Sasaran :		
	1. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah		
	2. Meningkatnya Penguatan Pencegahan Korupsi dan Penanganan Pengaduan yang berindikasi Korupsi		
	3. Meningkatnya Implementasi SAKIP Inspektorat Daerah		
	IKU		
	1	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	3,080
	2	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Selesai ditindaklanjuti	93,8
3	Nilai Kapabilitas APIP	3,04	
4	Nilai IEPK	2,950	
5	Presentase tertanganinya Pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi	100%	
6	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	55	
7	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	77,30	
Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			

2. Risiko Operasional Inspektorat Daerah

Tabel 3.2
Penetapan Konteks Operasional

Tujuan Strategis	: Meningkatkan Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga							
	: Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Pemerintah Daerah							
Sasaran Strategis	: Meningkatkan Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah							
	: Meningkatkan Penguatan Pencegahan Korupsi dan Penanganan Pengaduan yang berindikasi Korupsi							
	: Meningkatkan Implementasi SAKIP Inspektorat Daerah							
Program, Indikator Program, Target Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan, Target Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan, Target Sub Kegiatan :								
Program	Indikator Program	Target Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan
Program Penyelenggaraan Pengawasan	- Persentase Nilai Potensial Kerugian Daerah/Negara yang Berhasil Ditarik	73,2	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Objek Pemeriksaan yang diperiksa	154	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4
	- Persentase Capaian Program Kerja Pengawasan Tahunan	100				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah	39
						Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	52
						Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	123
						Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1
						Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	23

			Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100,00%	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2	
						Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	28	
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	-	Nilai Indeks Manajemen Risiko	2,90	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan	100,00%	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	3
	-	Nilai MCP Korsupgah (Area Penguatan APIP)	93,10	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan kegiatan pendampingan MCP korpsupgah	4	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	8
	-	Persentase Pengaduan Berindikasi Tindak Pidana Korupsi yang terbukti	100		Jumlah laporan kegiatan pembinaan terhadap OPD menuju WBK WBBM	5	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	21
							Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4
							Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikas Penegakan Integritas	8

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Inspektorat Daerah	3
	-	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti	100		Persentase dokumen laporan disusun	100	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10
	-	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan	100	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48
	-	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	100				Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12
	-	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan	100	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Jam Latihan Pegawai	100	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	48

			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Penunjang Operasional Kantor	100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	12
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12
						Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Kantor yang Tersedia	100	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12

			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1

B. Hasil Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Dari identifikasi yang dilakukan, diperoleh 14 risiko strategis dan 64 risiko operasional.

Rincian Identifikasi Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran :

Form 3.b : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis

Form 3.c : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional

C. Hasil Analisis Risiko

Hasil identifikasi risiko kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan kriteria penilaian risiko. Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Tujuannya adalah untuk memahami risiko yang mungkin terjadi, menilai dampaknya, dan menentukan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi atau mengelola risiko tersebut. Adapun rincian analisis risiko dapat dilihat pada lampiran form 4.

Sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 700/6652/2024 tanggal 22 April 2024 tentang Pengelolaan Risiko Strategis dan Risiko Operasional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, Analisis Risiko dan penentuan prioritas penanganan risiko telah dilakukan menggunakan Matrik Nilai Risiko sebagai berikut :

Matriks Analisis Risiko			Dampak/Konsekuensi			
			Tidak signifikan	Kecil	Tinggi	Sangat Tinggi
			1	2	3	4
Kemungkinan Terjadinya Risiko	Hampir Pasti Terjadi	5	5	10	15	20
	Sering Terjadi	4	4	8	12	16
	Kadang Terjadi	3	3	6	9	12
	Jarang Terjadi	2	2	4	6	8
	Hampir Jarang Terjadi	1	1	2	3	4

Keterangan Warna	Hijau	Biru	Orange	Merah
Level Risiko	Sangat rendah	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi
Besaran Risiko	1-4	6-8	9-14	15-20

Dasar penentuan toleransi risiko atau tingkat risiko yang dapat diterima, yakni batasan besaran kuantitatif level kemungkinan terjadinya dan dampak risiko yang dapat diterima atau yang disebut dengan selera risiko ditetapkan risiko dengan level tinggi hingga sangat tinggi (≥ 9) menjadi risiko prioritas yang harus ditangani. Berdasarkan hal tersebut, Hasil analisis risiko pada tahun 2025 Inspektorat Daerah telah menetapkan 19 (Sembilan belas) risiko prioritas yang terdiri dari 5 (lima) risiko strategis dan 14 (enam belas) risiko operasional.

Terhadap risiko-risiko prioritas yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya. Rincian daftar risiko prioritas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran Form 5: Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas.

D. Pengendalian yang Sudah dilakukan

Atas Risiko-risiko yang diprioritaskan, telah dilakukan upaya pengendalian sebagai berikut :

Tabel 3.3
Pengendalian yang sudah dilakukan

No	Risiko Prioritas	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)
I	Risiko Strategis	
1	OPD Belum memetakan Potensi Kecurangan / Potensi terjadinya Korupsi	Perbup Pedoman Pengelolaan Risiko, Perbup Pengendalian Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
2	OPD dan Pemda terlambat dalam melaksanakan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi	1. Telah dilaksanakan Sosialisasi Penilaian Mandiri SPIP 2. Telah dibentuk Tim Asesor OPD dan Pemda 3. Telah dibentuk Satgas SPIP
3	Keterlambatan Obrik dalam penyelesaian tidaklanjut Hasil Pemeriksaan	Telah disusun Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Kabupaten Purbalingga
4	Pemantauan atas Rencana Tindak Pengendalian Risiko Fraud belum dilaksanakan secara berkala	Perbup Pedoman Pengelolaan Risiko, Perbup Pengendalian Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
5	Pegawai tidak memanfaatkan saluran whistleblowing karena masih tidak percaya mekanisme perlindungan pelapor berjalan	Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Pengaduan (<i>Whistle Blowing System</i>) Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Purbalingga
II	Risiko Operasional	
PENGAWASAN INTERNAL		
6	Dokumen Pendukung Pengawasan Kinerja tidak dapat diperoleh tepat waktu	Koordinasi intensif dengan OPD Terkait sebelum pemeriksaan dilaksanakan
7	Keterlambatannya Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Keuangan	Pemantauan secara berkala Progres Penyelesaian LHP Secara Online
8	Ketidaksesuaian dokumen tindaklanjut dengan Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK/APIP	Telah disusun Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Kabupaten Purbalingga
9	Keterlambatannya Penyusunan LH Pengawasan Kinerja	1. Pemantauan secara berkala Progres Penyelesaian LHP Secara Online 2. SOP dan Standar Pelayanan Pengawasan Keuangan
10	Rekomendasi hasil pengawasan laporan kinerja tidak tepat	1. Reviu berjenjang oleh pimpinan 2. SOP dan Standar Pelayanan Pengawasan Kinerja
11	Dokumen pendukung kegiatan pengawasan keuangan tidak didapatkan tepat waktu	1. Pemantauan secara berkala Progres Penyelesaian LHP Secara Online 2. SOP dan Standar Pelayanan Pengawasan Keuangan
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		
12	Tingginya beban kerja APIP	Anjab dan ABK
13	Evidence SPIP yang tidak sesuai	1. Telah dibentuk Tim Asesor OPD dan Pemda 2. Rapat Koordinasi
14	Ketidaksesuaian Rencana Aksi dengan Rekomendasi Hasil evaluasi maupun dengan Indikator Kegiatan Utama General dan tema tematik	1. Telah dibentuk Tim RB Kabupaten 2. Rapat Koordinasi
15	Ketidaksesuaian dokumen Pendukung/ Evidence Penilaian Mandiri Zona Integritas	1. Terdapat tim pembangunan zona Integritas Unit Kerja 2. Telah dibentuk Tim Penilai Internal

16	OPD tidak segera melaksanakan Perbaikan/tindak lanjut atas rekomendasi Kemenpan RB terkait Penilaian Zona Integritas	1. Terdapat tim pembangunan zona Integritas Unit Kerja 2. Telah dibentuk Tim Penilai Internal
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		
17	Manipulasi data e-kinerja pegawai ASN	1. PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. 2. Perbup No. 36 Tahun 2022 tentang TPP. 3. Bukti penugasan individu bulanan 4. Verifikasi langsung atasan
18	Keterlambatan proses pengadaan	1. Penunjukan Pejabat Pengadaan 2. Terdapat Rencana Umum Pengadaan
19	Penyalahgunaan BMD untuk kepentingan pribadi	1. Perbup No. 71 Tahun 2020 tentang pengelolaan BMD 2. SK Pemegang BMD 3. Pakta Integritas 4. Labelling BMD setiap semesteran 5. KIR 6. KIB 7. BA Serah Terima Aset 8. Rekon Aset

Meskipun telah melaksanakan kegiatan pengendalian namun kegiatan pengendalian yang dilaksanakan masih terdapat celah sehingga membutuhkan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengendalian. Untuk itu di pada tahun 2025 ini disusun rencana pengendalian, menetapkan penanggungjawab pengendalian risiko dan target waktu penyelesaiannya seperti tercantum dalam Lampiran *Form 6 dan 7*.

Form 6 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian

Form 7 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

E. Pengendalian yang masih dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang sudah dilakukan/ yang sudah ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Atas hasil evaluasi efektifitas atas pengendalian yang sudah ada kemudahan dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP). RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang masih dibutuhkan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada dan pengendalian yang masih dibutuhkan selengkapnya disajikan dalam Lampiran I : *Form 6 dan Form 7*

F. Rancangan Informasi dan Komunikasi

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan media informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Inspektorat Daerah perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak yang terkait misalnya Kepala Daerah, Kepala OPD terkait, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dapat disampaikan melalui berbagai media seperti Surat, Rapat, *Focus Grup Discussion*, sosialisasi, dan lain sebagainya. Secara rinci rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Lampiran *Form 8* (kolom a - f). (*Form 8 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 sehingga masih terdapat kolom yang kosong*).

G. Rancangan Pemantauan

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi Lampiran *Form 9*

Rencana dan Realisasi Pemantauan atas Kegiatan Pengendalian Intern yang Dibutuhkan (kolom f dan g).

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka Inspektorat Daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran *Form 10 Pencatatan Kejadian Risiko (Risk Event) dan Pelaksanaan RTP (kolom d - g, dan kolom j - k).*

BAB IV PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan/pembangunan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien, dan mencapai tujuan/sasaran.

Komitmen dari segenap manajemen dan seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang profesional, efektif, efisien, transparan, serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian, sehingga peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP secara bertahap dan berkelanjutan akan dapat tercapai.

Purbalingga, 31 Januari 2025
**INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**


ATO SUSANTO, AP, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740706 199311 1 001

LAMPIRAN

REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

Tahun Penilaian : 2025

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)																											SIMPULAN KUOSIONER CEE			
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27		R28	R29	Modus
a	b	c																											d			
A.	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA																												MEMADAI/ KURANG MEMADAI			
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	Memadai	
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	3	3	Memadai	
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	4	4	3	4	1	3	3	3	4	2	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	Memadai	
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	Memadai	
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI																												MEMADAI/ KURANG MEMADAI			
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	4	4	3	4	3	3	3	2	3	2	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3	Memadai	
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	3	3	3	4	3	3	3	2	3	2	3	3	3	4	2	3	3	4	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	Memadai	
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	3	2	3	3	3	3	3	2	3	2	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	Memadai	
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	3	2	3	2	3	3	3	2	3	2	3	3	2	3	3	4	3	3	3	Memadai	
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF																												MEMADAI/ KURANG MEMADAI			
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	Memadai	
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	2	3	Memadai
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3	2	3	Memadai

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)																											SIMPULAN KUOSIONER CEE			
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27		R28	R29	Modus
a	b	c																											d			
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	4	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	Memadai	
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB YANG TEPAT																											MEMADAI/ KURANG MEMADAI				
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	Memadai	
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	3	Memadai	
3	Kewenangan direviu secara periodik	3	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	Memadai	
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA																											MEMADAI/ KURANG MEMADAI				
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	4	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	2	3	3	Memadai	
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	4	3	2	3	2	2	3	3	3	2	3	3	3	2	2	0	3	4	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	Memadai	
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	4	3	3	4	2	3	2	3	3	3	3	3	1	2	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	Memadai	
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko	4	2	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	Memadai	
5	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	4	3	2	4	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	Memadai	
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	4	3	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	Memadai	
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	3	2	2	3	2	2	1	3	3	1	3	2	3	1	2	3	2	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	Memadai
G	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF																											MEMADAI/ KURANG MEMADAI				
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/ program Secara periodik	4	3	2	4	3	4	2	3	3	4	4	3	3	2	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	Memadai	
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	Memadai

CEE Berdasarkan Dokumen
Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern
di Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga

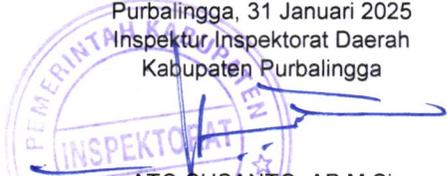
Tahun Penilaian : 2025			
No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	d
1	Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024	a. Masih terdapat temuan atas LHP BPK terkait Pengamanan Aset Daerah yang masih berulang atau belum tuntas b. Pemantauan atas RTP belum dilakukan secara berkala/periodik, sebagian besar sebatas jika ada instruksi/arahan. Penilaian risiko fraud belum sepenuhnya menghasilkan peta risiko korupsi	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF
2	Laporan Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Kabupaten Purbalingga Tahun 2024	a. Pelaksanaan Audit Ketaatan (Compliance Audit) belum sepenuhnya menyusun/ mengembangkan langkah kerja pengawasan yang mempertimbangkan risiko-risiko strategis yang ada pada objek pengawasan b. Jasa Konsultasi yang diberikan Inspektorat belum seluruhnya mengarah pada pembunaa kepada perangkat daerah yang masih memiliki tingkat kematangan MR yang rendah maupun perangkat daerah yang belum memiliki Register Risiko/Profil Risiko, sehingga layanan konsultasi belum mampu memberikan perbaikan terhadap pengelolaan risiko di Lingkungan Pemkab Purbalingga	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

**Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga**

Tahun Penilaian		: 2025					
No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan integritas dan nilai etika	Memadai		Memadai		Memadai	
2	Komitmen terhadap kompetensi			Memadai		Memadai	
3	Kepemimpinan yang kondusif			Memadai		Memadai	
4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan			Memadai		Memadai	
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat			Memadai		Memadai	
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM			Memadai		Memadai	
7	Perwujudan peran APIP yang efektif	Kurang Memadai	a. Masih terdapat temuan atas LHP BPK terkait Pengamanan Aset Daerah yang masih berulang atau belum tuntas b. Pemantauan atas RTP belum dilakukan secara berkala/periodik, sebagian besar sebatas jika ada instruksi/arahan. Penilaian risiko fraud belum sepenuhnya menghasilkan peta risiko korupsi	Memadai		Kurang Memadai	Berdasarkan Laporan Hasil LHE Maturitas SPIP masih terdapat beberapa catatan dimana catatan tersebut terdapat peran andil APIP yang cukup besar
			a. Pelaksanaan Audit Ketaatan (Compliance Audit) belum sepenuhnya menyusun/ mengembangkan langkah kerja pengawasan yang mempertimbangkan risiko-risiko strategis yang ada pada objek pengawasan b. Jasa Konsultasi yang diberikan Inspektorat belum seluruhnya mengarah pada pembunaa kepada perangkat daerah yang masih memiliki tingkat kematangan MR yang rendah maupun perangkat daerah yang belum memiliki Register Risiko/Profil Risiko, sehingga layanan konsultasi belum mampu memberikan perbaikan terhadap pengelolaan risiko di Lingkungan Pemkab Purbalingga				Berdasarkan Laporan Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga masih terdapat beberapa catatan dimana catatan tersebut terdapat peran andil APIP yang cukup besar
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait			Memadai		Memadai	

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Purbalingga		
Tahun Penilaian	2025		
Periode yang dinilai	2021-2016		
Urusan Pemerintahan	Urusan Pengawasan		
OPD yang Dinilai	Inspektorat Daerah		
Sumber Data	Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, Renja 2025, IKU Inspektorat Daerah		
Tujuan Strategis	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga		
	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah		
	Meningkatnya Penguatan Pencegahan Korupsi dan Penanganan Pengaduan yang berindikasi Korupsi		
	Meningkatnya Implementasi SAKIP Inspektorat Daerah		
IKU OPD	IKU		2025
	1	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	3,080
	2	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Selesai ditindaklanjuti	93,8
	3	Nilai Kapabilitas APIP	3,04
	4	Nilai IEPK	2,950
	5	Persentase tertanganinya Pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi	100
	6	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	55
	7	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	77,30
Program	Program Penyelenggaraan Pengawasan		
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</p> <p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Meningkatnya Penguatan Pencegahan Korupsi dan Penanganan Pengaduan yang berindikasi Korupsi Meningkatnya Implementasi SAKIP Inspektorat Daerah 		
	IKU		
	1	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	3,08
	2	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Selesai ditindaklanjuti	93,8
	3	Nilai Kapabilitas APIP	3,04
	4	Nilai IEPK	2,95
	5	Persentase tertanganinya Pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi	100
	6	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	55
	7	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	77,3
	Program Penyelenggaraan Pengawasan		
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
			<p>Purbalingga, 31 Januari 2025</p> <p>Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga</p>  <p>ATO SUSANTO, AP, M.Si Pembina Utama Muda NIP 19740706 199311 1 001</p> 

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	:	Pemerintah Kabupaten Purbalingga						
Tahun Penilaian	:	2025						
Periode yang dinilai	:	2021-2016						
Urusan Pemerintahan	:	Urusan Pengawasan						
OPD yang Dinilai	:	Inspektorat Daerah						
Sumber Data	:	Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, Renja 2025, IKU Inspektorat Daerah						
Tujuan Strategis	:	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Pemerintah Daerah						
Sasaran Strategis	:	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Meningkatnya Penguatan Pencegahan Korupsi dan Penanganan Pengaduan yang berindikasi Korupsi Meningkatnya Implementasi SAKIP Inspektorat Daerah						
Program, Indikator Program, Target Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan, Target Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan, Target Sub Kegiatan :								
Program	Indikator Program	Target Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan
Program Penyelenggaraan Pengawasan	- Persentase Nilai Potensial Kerugian Daerah/Negara yang Berhasil Ditarik	73,2	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Objek Pemeriksaan yang diperiksa	154	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4
	- Persentase Capaian Program Kerja Pengawasan Tahunan	100				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah	39
						Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	52
						Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	123
						Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1
						Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	23

			Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100,00%	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2
						Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	28
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	- Nilai Indeks Manajemen Risiko	2,90	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan	100,00%	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	3
	- Nilai MCP Korsupgah (Area Penguatan APIP)	93,10	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan kegiatan pendampingan MCP korpugah	4	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	8
	- Persentase Pengaduan Berindikasi Tindak Pidana Korupsi yang terbukti	100		Jumlah laporan kegiatan pembinaan terhadap OPD menuju WBK WBBM	5	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	21
						Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4
						Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikas Penegakan Integritas	8
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Daerah	100	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Inspektorat Daerah	3
	- Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti	100		Persentase dokumen laporan disusun	100	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10

	-	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan	100	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48
	-	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	100				Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12
	-	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan	100	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Jam Latihan Pegawai	100	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	48
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Penunjang Operasional Kantor	100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	12
							Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12
							Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12
							Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Kantor yang Tersedia	100	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Purbalingga										
Nama OPD	Inspektorat Daerah										
Tahun Penilaian	2025										
Periode yang dinilai	2021-2016										
Tujuan Strategis	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Pemerintah Daerah										
Urusan Pemerintahan	Urusan Pengawasan										
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Nilai Maturitas SPIP	OPD Belum melakukan Penilaian Risiko Strategis dan Operasional	RSO.2025.99.04.01	Inspektur	Kurang masifnya Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Risiko	Internal	C	tidak terantisipasi risiko yang dapat menghambat tercapainya tujuan	Bupati/APIP	
			OPD Belum memetakan Potensi Kecurangan / Potensi terjadinya Korupsi	RSO.2025.99.04.02	Inspektur	Kurang masifnya Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Risiko	Internal	C	tidak terantisipasi risiko tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian daerah	bupati/masyarakat	
			OPD Belum menyusun Rencana Mitigasi Risiko maupun potensi kecurangan	RSO.2025.99.04.03	Inspektur	Kurang masifnya Sosialisasi Pedoman Penyusunan Fraud Control Plan	Internal	C	meningkatnya kemungkinan peristiwa yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi	bupati/masyarakat	
			OPD dan Pemda terlambat dalam melaksanakan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi	RSO.2025.99.04.04	Inspektur	Koordinasi antar tim Penilaian Mandiri SPIP terintegrasi tidak berjalan dengan baik	Internal	C	Penjanaan Kualitas atas PM SPIP terlambat	bupati/masyarakat	
			Penjaminan Kualitas Atas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi tidak dilaksanakan tepat waktu	RSO.2025.99.04.05	Irbanwil III	Terlambatnya Penilaian Mandiri SPIP terintegrasi	Internal	C	tidak dilakukan evaluasi atas PM SPIP oleh evaluator BPKP	bupati/masyarakat	
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Selesai ditindaklanjuti	Keterlambatan Obrik dalam penyelesaian tidaklanjut Hasil Pemeriksaan	RSO.2025.99.04.06	Inspektur	Komitmen Pimpinan OPD dalam penyelesaian Tindakanlanjut	Internal	C	terhambatnya proses penyelesaian potensi kerugian negara	bupati/masyarakat	
		Nilai Kapabilitas APIP	Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP tidak dilaksanakan Tepat Waktu	RSO.2025.99.04.07	Sekretaris Inspektorat	Banyaknya tugas-tugas pengawasan mandatory	Internal	C	tidak dilakukan evaluasi atas PM Kapabilitas APIP oleh BPKP	bupati/masyarakat	
	Meningkatnya Penguatan Pencegahan Korupsi dan Penanganan Pengaduan yang berindikasi Korupsi	Nilai IEPK	Pemantauan atas Rencana Tindak Pengendalian Risiko Fraud belum dilaksanakan secara berkala	RSO.2025.99.04.08	Inspektur	Kurangnya kesadaran manajemen perangkat daerah dalam pengelolaan risiko fraud	Eksternal	C	Potensi kejadian fraud meningkat	bupati/masyarakat	
			Kasus Gratifikasi meningkat	RSO.2025.99.04.09	Inspektur	Kurangnya Pemahaman tentang Etika dan Moral Kerja serta rendahnya integritas pegawai	Eksternal	C	Menurunnya kepercayaan publik dan meningkatnya risiko korupsi	bupati/masyarakat	
			Pegawai tidak memanfaatkan saluran whistleblowing karena masih tidak percaya mekanisme perlindungan pelapor berjalan	RSO.2025.99.04.10	Irbansus	Kepercayaan terhadap mekanisme perlindungan pelapor kurang	Internal	C	Meningkatnya potensi kejadian korupsi dan penyalahgunaan wewenang	bupati/masyarakat	

**Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD**

Nama Pemda : Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga
 Nama OPD : Inspektorat Daerah
 Tahun Penilaian : 2025
 Periode yang dinilai :
 Tujuan Strategis : 1. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah
 Sasaran strategis OPD : 1. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pengawasan

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
							Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c					d	e	f	g	h	i	j	k	l
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN															
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Objek Pengawasan yang diperiksa	154	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4		Keterlambatan penyusunan laporan ikhtisar	ROO.2025.99.04.01	Sub Bag Analisis dan Evaluasi	Pengumpulan data yang tidak tepat waktu	eksternal	C	manfaat menurun	Masyarakat / Bupati
								Ketidaksihonestan dokumen tindak lanjut dengan Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK/APIP	ROO.2025.99.04.02	Sub Bag Analisis dan Evaluasi	Pemahaman Obrik atas Rekomendasi Audit	eksternal	C	dokumen tindak lanjut tidak dapat diterima	Bupati
								Kurang tertibnya pengarsipan dokumentindak lanjut	ROO.2025.99.04.03	Sub Bag Analisis dan Evaluasi	Kelalaian Petugas Arsip	internal	C	hilangnya dokumen tindak lanjut Obrik	Obrik/Bupati
								Rekomendasi APIP sudah tidak relevan untuk ditindaklanjuti	ROO.2025.99.04.04	Tim Pemeriksa	Perubahan Regulasi	eksternal	C	Rekomendasi tidak dapat dilaksanakan	Obrik/Bupati
2	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Objek Pengawasan yang diperiksa	154	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah	39	Pelaporan	Keterlambatannya Penyusunan LH Pengawasan Kinerja	ROO.2025.99.04.05	Irbanwil	Penyusunan program kerja audit tidak handal	Internal	C	Hasil Pemeriksaan kurang bermanfaat Hasil Rekomendasi sudah tidak relevan lagi	Objek pemeriksaan/ Bupati
								Dokumen Pendukung Pengawasan Kinerja tidak dapat diperoleh tepat waktu	ROO.2025.99.04.06	Inspektur	Tidak tertibnya pencatatan dan pengelolaan keuangan obrik	Eksternal	C	Terganggunya proses audit	APIP/ Bupati/ Masyarakat
								Rekomendasi hasil pengawasan laporan kinerja tidak tepat	ROO.2025.99.04.07	Tim pemeriksa	Analisa data Pemeriksaan tidak mendalam dan kekeliruan dalam mengambil kriteria audit			Rekomendasi tidak dapat diterapkan dan ditindaklanjuti	Objek Pemeriksaan, Bupati, Instansi
3	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Objek Pengawasan yang diperiksa	154	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan Keuangan	52	Pelaporan	Keterlambatannya Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Keuangan	ROO.2025.99.04.08	Sub Bag Analisis dan Evaluasi	Penyusunan Program Kerja Audit tidak handal	internal	C	Manfaat Hasil Pemeriksaan Menurun Hasil Rekomendasi sudah tidak relevan lagi	APIP/Bupati/masyarakat at
								Dokumen pendukung kegiatan pengawasan keuangan tidak didapatkan tepat waktu	ROO.2025.99.04.09	Tim Pemeriksa	tidak tertibnya pencatatan dan Pengelolaan Keuangan Obrik	eksternal	C	Terganggunya Proses Audit	Obrik/Bupati

								Analisa data Pemeriksaan tidak mendalam	ROO.2025.99.04.10	Tim Pemeriksa	Penyusunan Program Kerja Audit tidak handal	internal	C	Hasil Audit tidak dapat digunakan untuk	Objek Pemeriksaan/Bupati
								Kesalahan dalam Penetapan Jumlah Objek, ruang lingkup dan sasaran Pengawasan internal	ROO.2025.99.04.11	Sekretariat, Irban	Kurang cermat dalam Penyusunan PKPT berbasis Risiko	internal	C	Tujuan audit tidak tercapai/ hasil audit kurang bermanfaat	Bupati, Obrik, Inspektorat
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Objek Pengawasan yang dipenksa	154	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Reviu Kinerja	123	Pelaporan	Keterlambatan Penyusunan LHR Kinerja	ROO.2025.99.04.12	Irbanwil	Penyusunan Program Kerja Reviu tidak handal	internal	UC	Hasil Pemeriksaan kurang bermanfaat Hasil Rekomendasi sudah tidak relevan lagi	Objek Pemeriksaan/Bupati
								Rekomendasi hasil reviu laporan kinerja tidak tepat	ROO.2025.99.04.13	Tim pemeriksa	Analisa data Pemeriksaan tidak mendalam dan kekeliruan dalam mengambil kriteria audit			Rekomendasi tidak dapat diterapkan dan ditindaklanjuti	Objek Pemeriksaan, Bupati, Instansi
4	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Objek Pengawasan yang dipenksa	154	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Reviu Keuangan	1	Pelaporan	Laporan Hasi Reviu Laporan Keuangan tidak disusun tepat waktu	ROO.2025.99.04.14	Irbanwil 3, Tim Pemeriksa	1. OPD tidak menyusun Laporan Keuangan tepat waktu 2. Kapasitas SDM yang perlu ditingkatkan	internal	C	1. Tidak mendapat predikat WTP 2. Citra Instansi buruk	Bupati
5	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Objek Pengawasan yang dipenksa	154	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Pengawasan Desa	23	Pelaporan	Keterlambatannya Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Desa	ROO.2025.99.04.15	Sub Bag Analisis dan Evaluasi, Tim Pemeriksa	Penyusunan Program Kerja Audit tidak handal	internal	UC	Manfaat Hasil Pemeriksaan MenurunHas	Objek Pemeriksaan/Bupati
										Tim Pemeriksa	tidak tertibnya pencatatan dan Pengelolaan	eksternal	C	Terganggunya Proses Audit	APIP/Bupati/masyarakat
								Terganggunya Independensi Tim Audit saat menjalankan tugas Pengawasan Desa	ROO.2025.99.04.16	Tim Pemeriksa	Tekanan dari pihak-pihak tertentu	eksternal	C	Hasil Audit tidak menggambarkan Kondisi	APIP/Bupati/masyarakat
6	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	28	Pelaporan	Keterlambatannya Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	ROO.2025.99.04.17	Tim Pemeriksa	Penyusunan Program Kerja Audit tidak handal	internal	C	Manfaat Hasil Pemeriksaan Menurun Hasil Rekomendasi sudah tidak relevan lagi	Objek Pemeriksaan/Bupati
								Konflik kepentingan antara APIP dengan objek pemeriksaan (auditi)	ROO.2025.99.04.18	Tim Pemeriksa/ Inspektur	1. Kurangnya Integritas Pimpinan Inspektorat dan APIP 2. Lemahnya sistem pengendalian intern	internal	C	1. Kerugian keuangan daerah. 2. Reputasi Instansi. 3. Dampak hukum	Instansi/ASN Perangkat Daerah
								Suap dari objek pemeriksaan (auditi)	ROO.2025.99.04.19	Tim Pemeriksa/ Inspektur	1. Kurangnya Integritas Pejabat/oknum APIP 2. Lemahnya sistem pengendalian intern 3. Tekanan Ekonomi	internal	C	1. Kerugian keuangan daerah. 2. Reputasi Instansi. 3. Dampak hukum	Instansi/ASN Perangkat Daerah/masyarakat
								Gratifikasi dari objek pemeriksaan (auditi)	ROO.2025.99.04.20	Tim Pemeriksa/ Inspektur	1. Kurangnya Integritas Pejabat/oknum APIP/Auditi. 2. Pembenaran budaya ketimuran memberi hadiah	internal	C	1. Kerugian keuangan daerah. 2. Reputasi Instansi. 3. Dampak hukum	APIP/Bupati/masyarakat

							Pemerasan oleh oknum APIP kepada Auditi	ROO.2025.99.04.21	Tim Pemeriksa/Inspektur	1. Kurangnya integritas pegawai 2. Kesempatan sebagai APIP/ pejabat berwenang 3. Tekanan Ekonomi	internal	C	1. Dampak Kerugian Keuangan daerah 2. Dampak Budaya yang tidak Baik 3. Reputasi Instansi 4. Dampak Hukum	APIP/Bupati/masyarakat
							penanganan pengaduan terhambat	ROO.2025.99.04.22	Tim Pemeriksa	Data dukung/bukti awal tidak memadai	eksternal	C	terhambatnya kegiatan pengawasan	Masyarakat / APIP
							Dokumen Pendukung Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu tidak dapat didapatkan tepat waktu	ROO.2025.99.04.23	Tim Pemeriksa	tidak tertibnya pencatatan dan Pengelolaan Keuangan Obrik	eksternal	C	Terganggunya Proses Audit	APIP/Bupati/masyarakat
							Terganggunya Independensi Tim Audit saat menjalankan tugas PDTT	ROO.2025.99.04.24	Tim Pemeriksa	Tekanan dari pihak-pihak tertentu	eksternal	C	Hasil Audit tidak menggambarkan Kondisi sebenarnya	APIP/Bupati/masyarakat
							Kegagalan Auditor dalam mengidentifikasi Permasalahan dalam Audit Investigasi	ROO.2025.99.04.25	Tim Pemeriksa	Penyusunan Program Kerja Audit tidak handal	internal	C	Hasil Audit tidak dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan	Obrik/Bupati
7	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2	Konflik kepentingan antara APIP dengan objek pemeriksaan (auditi) dalam pelaksanaan PKKN	ROO.2025.99.04.26	Tim Pemeriksa/Inspektur	1. Kurangnya Integritas Pimpinan Inspektorat dan APIP 2. Lemahnya sistem pengendalian intern	internal	C	1. Kerugian keuangan daerah. 2. Reputasi Instansi. 3. Dampak hukum	Instansi/ASN Perangkat Daerah
							Suap dari objek pemeriksaan (auditi) dalam pelaksanaan PKKN	ROO.2025.99.04.27	Tim Pemeriksa/Inspektur	1. Kurangnya Integritas Pejabat/oknum APIP 2. Lemahnya sistem pengendalian intern 3. Tekanan Ekonomi	internal	C	1. Kerugian keuangan daerah. 2. Reputasi Instansi. 3. Dampak hukum	Instansi/ASN Perangkat Daerah/masyarakat
							Gratifikasi dari objek pemeriksaan (auditi) dalam pelaksanaan PKKN	ROO.2025.99.04.28	Tim Pemeriksa/Inspektur	1. Kurangnya Integritas Pejabat/oknum APIP/Auditi. 2. Pembenaan budaya ketimuran memberi hadiah	internal	C	1. Kerugian keuangan daerah. 2. Reputasi Instansi. 3. Dampak hukum	APIP/Bupati/masyarakat
							Hasil Perhitungan Kerugian Negara/Daerah tidak tepat	ROO.2025.99.04.29	Tim Pemeriksa/Inspektur	Analisis tidak memadai da kapasitas SDM yang kurang	internal	C	Potensi kerugian negara tidak dapat ditarik	APIP/Bupati/masyarakat
							Terganggunya Independensi Tim Audit saat menjalankan tugas PKKN	ROO.2025.99.04.30	Tim Pemeriksa	Tekanan dari pihak-pihak tertentu	eksternal	C	Hasil Audit tidak menggambarkan Kondisi sebenarnya	APIP/Bupati/masyarakat

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN ASISTENSI

7	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Proseniase kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang di tetapkan	100	Perumusan Kebijakan teknis dibidang pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	3	Tingginya beban kerja APIP	ROO.2025.99.04.31	Tim Audit/Sub Bag Perencanaan	Banyaknya penugasan mandatory	eksternal	UC	Pelaksanaan PKPT kurang maksimal	APIP/Bupati/masyarakat
							Penyusunan PPBR Tidak selesai tepat waktu	ROO.2025.99.04.32	Sub Bag Perencanaan	tidak tersedianya data faktor Risiko Obrik	eksternal	C	Keterlambatan Penyusunan PKPT	APIP/Bupati/masyarakat
							Konflik kepentingan antara APIP dengan Perangkat Daerah tertentu	ROO.2025.99.04.33	inspektur	1. Kurangnya Integritas Inspektur 2. Kesempatan sebagai Pejabat Berwenang 3. Lemahnya sistem pengendalian intern		C	1. Dampak Budaya yang tidak Baik 2. Reputasi Instansi	APIP/Bupati/masyarakat
8	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan MCP Korsupgah	4 Laporan	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	8	Evidence SPIP yang tidak sesuai	ROO.2025.99.04.34	Irbanus	Kurangnya pemahaman Asesor Pemda dan OPD tentang SPIP	eksternal	C	Nilai Maturitas SPIP mengalami penurunan	APIP/Bupati/masyarakat
9		Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan terhadap OPD menuju WBK WBBM	5 Laporan	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	21	Ketidaksesuaian Rencana Aksi dengan Rekomendasi Hasil evaluasi maupun dengan Indikator Kegiatan Utama General dan tema tematik	ROO.2025.99.04.35	Irbanwil	Ketidakhahaman terhadap rekomendasi MenpanRB	eksternal	C	Rencana aksi tidak mempengaruhi capaian kinerja	APIP/Bupati/masyarakat
							Rencana Aksi tidak dilaksanakan tepat waktu	ROO.2025.99.04.36	Irbanwil	kurangnya komitmen perangkat daerah	eksternal	C	Pelaksanaan rencana aksi tidak mendukung pencapaian kinerja	APIP/Bupati/masyarakat
							Laporan Evaluasi Internal Reformasi Birokras tidak disusun tepat waktu	ROO.2025.99.04.37	Irbanwil	Kurangnya pemahaman tim evaluator	internal	C	Rekomendasi hasil evaluasi internal tidak dapat diterapkan	APIP/Bupati/masyarakat
10				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan	8	Ketidaksesuaian dokumen Pendukung/ Evidence Penilaian Mandiri Zona Integritas	ROO.2025.99.04.38	Irban i	Kurangnya pemahaman tim pembangunan Zona Integritas (ZI) atas Lembar Kerja Evaluasi ZI	internal	C	Dokumen bukti tidak diterima	APIP/Bupati/masyarakat
							OPD tidak segera melaksanakan Perbaikan/tindak lanjut atas rekomendasi Kemenpan RB terkait Penilaian Zona Integritas	ROO.2025.99.04.39	Irban i	perbedaan tafsir antar tim Pembangunan Zona Integritas terkait rekomendasi Kemenpan RB	internal	C	tidak ada perbaikan kondisi atas rekomendasi Kemenpan RB	APIP/Bupati/masyarakat

11	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan terhadap OPD menuju WBK WBBM	2 Laporan	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi Pencegahan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan		Terlambatnya Pemenuhan dokumen Pendukung/ Evidane penilaian MCP korszupgah	ROO.2025.99.04.40	Irbanwil	Kurangnya koordinasi Tim MCP Korszupgah	internal	C	Dokumen bukti tidak diterima	APIP/ Bupati/ masyarakat
								Manipulasi data penilaian	ROO.2025.99.04.41	Tim Penilai	1. Kurangnya Integritas APIP dan OPD 2. Tekanan dari Atasan	internal	C	1. Dampak Budaya yang tidak Baik 2. Reputasi Instansi	APIP/Bupati/masyarakat
								Dokumen Bukti tidak sesuai dengan permintaan verifikator	ROO.2025.99.04.42	Irbanwil	Kurangnya koordinasi Tim MCP Korszupgah	internal	C	Dokumen bukti tidak diterima	APIP/ Bupati/ masyarakat

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

12	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Presentase Dokumen Perencanaan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100,00%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Inspektorat Daerah	3		Dokumen perencanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan	ROO.2025.99.04.43	Sub Bag Perencanaan	Pedoman yang dinamis	eksternal	UC	Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan	ASN Perangkat Daerah
								Keterlambatan dalam penyusunan dokumen perencanaan	ROO.2025.99.04.44	Sub Bag Perencanaan	data yang belum lengkap	Internal	C	Manfaat menurun	Instansi
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen laporan disusun		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10		Data kinerja tidak valid	ROO.2025.99.04.45	Sub Bag Perencanaan	Data tidak akurat	Internal	C	Pengambilan Keputusan kurang tepat	Instansi
								Keterlambatan dalam penyusunan dokumen evaluasi kinerja	ROO.2025.99.04.46	Sub Bag Perencanaan	data yang belum lengkap	Internal	C	Manfaat menurun	Instansi
13	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100,00%	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang		Kesalahan data kepegawaian	ROO.2025.99.04.47	Sub Bag Adum	Data kepegawaian yang tidak diupdate secara berkala	Internal	C	Keterlambatan penyesuaian data kepegawaian	ASN Perangkat Daerah
								Manipulasi data presensi pegawai ASN	ROO.2025.99.04.48	Sub Bag Adum	1. Kurangnya Integritas Pegawai. 2. Pembeneran bahwa tindakan tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan banyak dilakukan oleh orang lain. 3. Tekanan ekonomi	internal	C	1. Dampak Kerugian Keuangan Daerah 2. Dampak Budaya yang tidak Baik 3. Target kinerja tidak tercapai 4. Reputasi Institusi tidak baik	ASN Perangkat Daerah
								Manipulasi data e-kinerja pegawai ASN	ROO.2025.99.04.49	Sub Bag Adum	1. Kurangnya Integritas Pegawai. 2. Pembeneran bahwa tindakan tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan banyak dilakukan oleh orang lain. 3. Tekanan ekonomi	internal	C	1. Dampak Kerugian Keuangan Daerah 2. Dampak Budaya yang tidak Baik 3. Target kinerja tidak tercapai 4. Reputasi Institusi tidak baik	ASN Perangkat Daerah

				Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		SPJ Perjalanan Dinas tidak sesuai dengan realisasi	ROO.2025.99.04.50	Sub Bag Adum	1. Kurangnya Integritas Pegawai. 2. Pembeneran bahwa tindakan tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan banyak dilakukan oleh orang lain. 3. Tekanan ekonomi 4. Tekanan dari atasan 5. Adanya peluang (lemahnya Pengendalian Internal) 6. Kebijakan tidak didukung dengan anggaran	Internal	C	1. Dampak Kerugian Keuangan Daerah 2. Dampak Budaya yang tidak Baik 3. Resiko Hukum 4. Reputasi tidak baik 5. Temuan Pemeriksaan	ASN Perangkat Daerah
								Perjalanan Dinas Fiktif	ROO.2025.99.04.51	Sub Bag Adum	1. Kurangnya Integritas Pegawai. 2. Pembeneran bahwa tindakan tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan banyak dilakukan oleh orang lain. 3. Tekanan ekonomi 4. Tekanan dari atasan 5. Adanya peluang (lemahnya Pengendalian Internal) 6. Kebijakan tidak didukung dengan anggaran	Internal	C	1. Dampak Kerugian Keuangan Daerah 2. Dampak Budaya yang tidak Baik 3. Resiko Hukum 4. Reputasi tidak baik 5. Temuan Pemeriksaan	ASN Perangkat Daerah
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai kebutuhan		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	48		Ketidaksesuaian Kompetensi Diklat dengan Kebutuhan	ROO.2025.99.04.52	Sub Bag Adum	Analisis kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan kurang tepat	eksternal	C	Kompetensi tidak meningkat	Instansi, APIP
								Diklat fiktif	ROO.2025.99.04.53		1. Peluang 2. Tekanan ekonomi 3. Integritas Pegawai	Internal	C	1. Dampak Kerugian Keuangan Daerah 2. Dampak Budaya yang tidak Baik 3. Temuan Pemeriksaan	ASN Perangkat Daerah
14	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertelaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	12 Bulan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	9 Paket		Penganggaran tidak sesuai kebutuhan	ROO.2025.99.04.54	Sub Bag Adum	stock opname persediaan ATK tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan	Internal	C	Jumlah ATK tidak sesuai	ASN Perangkat Daerah
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan		Manipulasi jumlah peserta rapat	ROO.2025.99.04.55	Sub Bag Adum	1. Peluang 2. Tekanan ekonomi 3. Pembeneran bahwa tindakan tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan banyak dilakukan oleh orang lain.	Internal	C	1. Dampak Kerugian Keuangan Daerah 2. Dampak Budaya yang tidak Baik 3. Temuan Pemeriksaan	ASN Perangkat Daerah
								Manipulasi saldo persediaan ATK	ROO.2025.99.04.56	Sub Bag Adum	1. Peluang 2. Tekanan ekonomi 3. Pembeneran bahwa tindakan tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan banyak dilakukan oleh orang lain.	Internal	C	1. Dampak Kerugian Keuangan Daerah 2. Dampak Budaya yang tidak Baik 3. Temuan Pemeriksaan	Instansi/ASN Perangkat Daerah
15	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 Paket		Keterlambatan proses pengadaan	ROO.2025.99.04.57	Sub Bag Adum	Keterlambatan penyusunan dokumen pengadaan/persyaratan pengadaan	Internal	C	Pemanfaatan barang yang kurang optimal	Instansi/ASN Perangkat Daerah
								Kualitas barang tidak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan	ROO.2025.99.04.58	Sub Bag Adum	Pejabat pengadaan tidak memeriksa kesesuaian barang diterima	Internal	C	1. Dampak Kerugian Keuangan Daerah 2. Dampak Budaya yang tidak Baik 3. Dampak Reputasi yang tidak baik	Instansi/ASN Perangkat Daerah
								Mark up harga	ROO.2025.99.04.59	Sub Bag Adum	1. Kurangnya Integritas Pegawai. 2. Pembeneran bahwa tindakan tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan banyak dilakukan oleh orang lain. 3. Tekanan ekonomi	Internal	C	1. Dampak Kerugian Keuangan Daerah 2. Dampak Budaya yang tidak Baik 3. Dampak Reputasi yang tidak baik	Instansi/ASN Perangkat Daerah
								Pengadaan fiktif	ROO.2025.99.04.60	Sub Bag Adum	1. Kurangnya Integritas Pegawai. 2. Pembeneran bahwa tindakan tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan banyak dilakukan oleh orang lain. 3. Tekanan ekonomi	Internal	C	1. Dampak Kerugian Keuangan Daerah 2. Dampak Budaya yang tidak Baik 3. Dampak Reputasi yang tidak baik	Instansi/ASN Perangkat Daerah

	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan		Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2		Penyalahgunaan BMD untuk kepentingan pribadi	ROO.2025.99.04.61	Sub Bag Adum	1. Kurangnya pemantauan terhadap pemakai BMD 2. Pembenaan bahwa tindakan tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan banyak dilakukan oleh orang lain.	internal	C	1. Dampak Kerugian Keuangan Daerah 2. Dampak Budaya yang tidak Baik	Instansi/ASN Perangkat Daerah
16	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		Keterlambatan pemenuhan penggajian PTT	ROO.2025.99.04.62	Sub Bag Perencanaan	Keterlambatan pengajuan GU	eksternal	UC	Hak PTT tidak terpenuhi	ASN Perangkat Daerah
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		Keterlambatan dalam pembayaran tagihan	ROO.2025.99.04.63	Sub Bag Adum	Besarnya tagihan listrik yang sulit terprediksi dan Keterlambatan tagihan internet	eksternal	UC	koneksi internet yang kurang cepat	ASN Perangkat Daerah
17	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	12 Unit	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1. 23 unit 2. 58 unit 3. 1 unit	1. 23 unit 2. 58 unit 3. 1 unit	Rincian anggaran yang disusun tidak sesuai kebutuhan	ROO.2025.99.04.64	Sub Bag Adum	Banyaknya aset yang harus dipelihara	Internal	UC	Pemeliharaan barang tidak sesuai kebutuhan	ASN Perangkat Daerah

Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis		Pemerintah Kabupaten Purbalingga 2025 Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Urusan Pengawasan			
Urusan Pemerintahan		Analisis Risiko			
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko f=dxe
a	b	c	d	e	f=dxe
I Risiko Strategis					
1	OPD Belum melakukan Penilaian Risiko Strategis dan Operasional	RSO.2025.99.04.01	3	2	6
2	OPD Belum memetakan Potensi Kecurangan / Potensi terjadinya Korupsi	RSO.2025.99.04.02	3	3	9
3	OPD Belum menyusun Rencana Mitigasi Risiko maupun potensi kecurangan	RSO.2025.99.04.03	3	2	6
4	OPD dan Pemda terlambat dalam melaksanakan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi	RSO.2025.99.04.04	3	3	9
5	Penjaminan Kualitas Atas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi tidak dilaksanakan tepat waktu	RSO.2025.99.04.05	3	2	6
6	Keterlambatan Obrik dalam penyelesaian tidaklanjut Hasil Pemeriksaan	RSO.2025.99.04.06	3	1	3
7	Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP tidak dilaksanakan Tepat Waktu	RSO.2025.99.04.07	3	3	9
8	Pemantauan atas Rencana Tindak Pengendalian Risiko Fraud belum dilaksanakan secara berkala	RSO.2025.99.04.08	4	2	8
9	Kasus Gratifikasi meningkat	RSO.2025.99.04.09	3	3	9
10	Pegawai tidak memanfaatkan saluran whistleblowing karena masih tidak percaya mekanisme perlindungan pelapor berjalan	RSO.2025.99.04.10	4	3	12
11	Terlambatnya Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	RSO.2025.99.04.11	3	3	9
12	Pelayanan yang diberikan tidak efektif dan tidak sesuai dengan perkembangan saat ini.	RSO.2025.99.04.12	4	1	4
13	Munculnya resistensi terhadap perubahan budaya organisasi	RSO.2025.99.04.13	4	2	8
14	tidak terselesaikannya Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP	RSO.2025.99.04.14	3	2	6
III Risiko Operasional OPD 1: ...					
1	Keterlambatan penyusunan laporan ikhtisar	ROO.2025.99.04.01	2	1	2
2	Ketidaksesuaian dokumen tindaklanjut dengan Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK/APIP	ROO.2025.99.04.02	3	3	9
3	Kurang tertibnya pengarsipan dokumentindak lanjut	ROO.2025.99.04.03	3	2	6
4	Rekomendasi APIP sudah tidak relevan untuk ditindaklanjuti	ROO.2025.99.04.04	4	1	4
5	Keterlambatannya Penyusunan LH Pengawasan Kinerja	ROO.2025.99.04.05	3	3	9
6	Dokumen Pendukung Pengawasan Kinerja tidak dapat diperoleh tepat waktu	ROO.2025.99.04.06	4	3	12
7	Rekomendasi hasil pengawasan laporan kinerja tidak tepat	ROO.2025.99.04.07	3	3	9
8	Keterlambatannya Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Keuangan	ROO.2025.99.04.08	4	3	12
9	Dokumen pendukung kegiatan pengawasan keuangan tidak didapatkan tepat waktu	ROO.2025.99.04.09	3	3	9
10	Analisa data Pemeriksaan tidak mendalam	ROO.2025.99.04.10	4	1	4
11	Kesalahan dalam Penetapan Jumlah Objek, ruang lingkup dan sasaran Pengawasan internal	ROO.2025.99.04.11	3	1	3
12	Keterlambatan Penyusunan LHR Kinerja	ROO.2025.99.04.12	3	1	3
13	Rekomendasi hasil reuiu laporan kinerja tidak tepat	ROO.2025.99.04.13	4	1	4
14	Laporan Hasi Reuiu Laporan Keuangan tidak disusun tepat waktu	ROO.2025.99.04.14	4	1	4
15	Keterlambatannya Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Desa	ROO.2025.99.04.15	2	2	4
16	Terganggunya Independensi Tim Audit saat menjalankan tugas Pengawasan Desa	ROO.2025.99.04.16	4	1	4
17	Keterlambatannya Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	ROO.2025.99.04.17	4	1	4
18	Konflik kepentingan antara APIP dengan objek pemeriksaan (auditi)	ROO.2025.99.04.18	4	2	8
19	Suap dari objek pemeriksaan (auditi)	ROO.2025.99.04.19	4	1	4
20	Gratifikasi dari objek pemeriksaan (auditi)	ROO.2025.99.04.20	4	2	8
21	Pemerasan oleh oknum APIP kepada Auditi	ROO.2025.99.04.21	4	1	4
22	penanganan pengaduan terhambat	ROO.2025.99.04.22	3	1	3
23	Dokumen Pendukung Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu tidak dapat didapatkan tepat waktu	ROO.2025.99.04.23	4	1	4
24	Terganggunya Independensi Tim Audit saat menjalankan tugas PDTT	ROO.2025.99.04.24	4	2	8
25	Kegagalan Auditor dalam mengidentifikasi Permasalahan dalam Audit Investigasi	ROO.2025.99.04.25	4	1	4

26	Konflik kepentingan antara APIP dengan objek pemeriksaan (auditi) dalam pelaksanaan PKKN	ROO.2025.99.04.26	4	1	4
27	Suap dari objek pemeriksaan (auditi) dalam pelaksanaan PKKN	ROO.2025.99.04.27	4	1	4
28	Gratifikasi dari objek pemeriksaan (auditi) dalam pelaksanaan PKKN	ROO.2025.99.04.28	3	1	3
29	Hasil Perhitungan Kerugian Negara/Daerah tidak tepat	ROO.2025.99.04.29	4	1	4
30	Terganggunya Independensi Tim Audit saat menjalankan tugas PKKN	ROO.2025.99.04.30	4	1	4
31	Tingginya beban kerja APIP	ROO.2025.99.04.31	3	4	12
32	Penyusunan PPBR Tidak selesai tepat waktu	ROO.2025.99.04.32	3	1	3
33	Konflik kepentingan antara APIP dengan Perangkat Daerah tertentu	ROO.2025.99.04.33	4	1	4
34	Evidence SPIP yang tidak sesuai	ROO.2025.99.04.34	3	3	9
35	Ketidaksesuaian Rencana Aksi dengan Rekomendasi Hasil evaluasi maupun dengan Indikator Kegiatan Utama General dan tema tematik	ROO.2025.99.04.35	3	3	9
36	Rencana Aksi tidak dilaksanakan tepat waktu	ROO.2025.99.04.36	3	2	6
37	Laporan Evaluasi Internal Reformasi Birokras tidak disusun tepat waktu	ROO.2025.99.04.37	3	2	6
38	Ketidaksesuaian dokumen Pendukung/ Evidance Penilaian Mandiri Zona Integritas	ROO.2025.99.04.38	3	3	9
39	OPD tidak segera melaksanakan Perbaikan/tindak lanjut atas rekomendasi Kemenpan RB terkait Penilaian Zona Integritas	ROO.2025.99.04.39	3	3	9
40	Terlambatnya Pemenuhan dokumen Pendukung/ Evidane penilaian MCP korsupgah	ROO.2025.99.04.40	3	1	3
41	Manipulasi data penilaian	ROO.2025.99.04.41	4	1	4
42	Dokumen Bukti tidak sesuai dengan permintaan verifikator	ROO.2025.99.04.42	4	1	4
43	Dokumen perencanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan	ROO.2025.99.04.43	3	2	6
44	Keterlambatan dalam penyusunan dokumen perencanaan	ROO.2025.99.04.44	4	1	4
45	Data kinerja tidak valid	ROO.2025.99.04.45	4	1	4
46	Keterlambatan dalam penyusunan dokumen evaluasi kinerja	ROO.2025.99.04.46	3	1	3
47	Kesalahan data kepegawaian	ROO.2025.99.04.47	3	1	3
48	Manipulasi data presensi pegawai ASN	ROO.2025.99.04.48	3	1	3
49	Manipulasi data e-kinerja pegawai ASN	ROO.2025.99.04.49	3	3	9
50	SPJ Perjalanan Dinas tidak sesuai dengan realisasi	ROO.2025.99.04.50	3	1	3
51	Perjalanan Dinas Fiktif	ROO.2025.99.04.51	3	1	3
52	Ketidaksesuaian Kompetensi Diklat dengan Kebutuhan	ROO.2025.99.04.52	2	1	2
53	Diklat fiktif	ROO.2025.99.04.53	2	1	2
54	Penganggaran tidak sesuai kebutuhan	ROO.2025.99.04.54	4	1	4
55	Manipulasi jumlah peserta rapat	ROO.2025.99.04.55	1	1	1
56	Manipulasi saldo persediaan ATK	ROO.2025.99.04.56	1	1	1
57	Keterlambatan proses pengadaan	ROO.2025.99.04.57	3	3	9
58	Kualitas barang tidak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan	ROO.2025.99.04.58	4	1	4
59	Mark up harga	ROO.2025.99.04.59	4	1	4
60	Pengadaan fiktif	ROO.2025.99.04.60	4	1	4
61	Penyalahgunaan BMD untuk kepentingan pribadi	ROO.2025.99.04.61	3	3	9
62	Keterlambatan pemenuhan penggajian PTT	ROO.2025.99.04.62	3	1	3
63	Keterlambatan dalam pembayaran tagihan	ROO.2025.99.04.63	2	1	2
64	Rincian anggaran yang disusun tidak sesuai kebutuhan	ROO.2025.99.04.64	4	1	4

Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis		: Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga 2025 Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga				
Urusan Pemerintahan		Urusan pengawasan				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
II Risiko Strategis						
1	OPD Belum memetakan Potensi Kecurangan / Potensi terjadinya Korupsi	RSO.2025.99.04.02	9	Inspektur	Kurang masifnya Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Risiko	tidak terantisipasinya tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian daerah
2	OPD dan Pemda terlambat dalam melaksanakan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi	RSO.2025.99.04.04	9	Inspektur	Koordinasi antar tim Penilaian Mandiri SPIP terintegrasi tidak berjalan dengan baik	Penjaminan Kualitas atas PM SPIP terlambat
3	Keterlambatan Obrik dalam penyelesaian tidaklanjut Hasil Pemeriksaan	RSO.2025.99.04.07	9	Inspektur	Kurangnya Komitmen Pimpinan OPD dalam penyelesaian Tindaklanjut	terhambatnya proses penyelesaian potensi kerugian negara
4	Pemantauan atas Rencana Tindak Pengendalian Risiko Fraud belum dilaksanakan secara berkala	RSO.2025.99.04.09	9	Inspektur	Kurangnya kesadaran manajemen perangkat daerah dalam pengelolaan risiko fraud	Potensi kejadian fraud meningkat
5	Pegawai tidak memanfaatkan saluran whistleblowing karena masih tidak percaya mekanisme perlindungan pelapor berjalan	RSO.2025.99.04.11	9	Irbansus	Kepercayaan terhadap mekanisme perlindungan pelapor kurang	Meningkatnya potensi kejadian korupsi dan penyalahgunaan wewenang
III Risiko Operasional						
PENGAWASAN INTERNAL						
6	Dokumen Pendukung Pengawasan Kinerja tidak dapat diperoleh tepat waktu	ROO.2025.99.04.06	12	Inspektur	Tidak tertibnya pencatatan dan pengelolaan keuangan obrik	Terganggunya proses audit
7	Keterlambatannya Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Keuangan	ROO.2025.99.04.08	12	Tim Pemeriksa	Penyusunan Program Kerja Audit tidak handal	Hasil Pemeriksaan kurang bermanfaat Hasil Rekomendasi sudah tidak relevan lagi
8	Ketidaksesuaian dokumen tindaklanjut dengan Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK/APIP	ROO.2025.99.04.02	9	Sub Bag Analisis dan Evaluasi	Pemahaman Obrik atas Rekomendasi Audit	dokumen tindaklanjut tidak dapat diterima
9	Keterlambatannya Penyusunan LH Pengawasan Kinerja	ROO.2025.99.04.05	9	Irbansus	Penyusunan program kerja audit tidak handal	Hasil Pemeriksaan kurang bermanfaat Hasil Rekomendasi sudah tidak relevan lagi
10	Rekomendasi hasil pengawasan laporan kinerja tidak tepat	ROO.2025.99.04.07	9	Tim pemeriksa	Analisa data Pemeriksaan tidak mendalam dan kekeliruan dalam mengambil kriteria audit	Rekomendasi tidak dapat diterapkan dan ditindaklanjuti
11	Dokumen pendukung kegiatan pengawasan keuangan tidak didapatkan tepat waktu	ROO.2025.99.04.09	9	Tim Pemeriksa	tidak tertibnya pencatatan dan Pengelolaan Keuangan Obrik	Terganggunya Proses Audit
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						
14	Tingginya beban kerja APIP	ROO.2025.99.04.31	12	Tim Audit/Sub Bag Perencanaan	Banyaknya penugasan mandatory	Pelaksanaan PKPT kurang maksimal
15	Evidence SPIP yang tidak sesuai	ROO.2025.99.04.34	9	Irbansus	Kurangnya pemahaman Asesor Pemda dan OPD tentang SPIP	Nilai Maturitas SPIP mengalami penurunan
16	Ketidaksesuaian Rencana Aksi dengan Rekomendasi Hasil evaluasi maupun dengan Indikator Kegiatan Utama General dan tema tematik	ROO.2025.99.04.35	9	Irbansus	Ketidakhahaman terhadap rekomendasi MenpanRB	Rencana aksi tidak mempengaruhi capaian kinerja
17	Ketidaksesuaian dokumen Pendukung/ Evidance Penilaian Mandiri Zona Integritas	ROO.2025.99.04.38	9	Irbansus	Kurangnya pemahaman tim pembangunan Zona Integritas (ZI) atas Lembar Kerja Evaluasi ZI	Dokumen bukti tidak diterima
18	OPD tidak segera melaksanakan Perbaikan/tindak lanjut atas rekomendasi Kemenpan RB terkait Penilaian Zona Integritas	ROO.2025.99.04.39	9	Irbansus	perbedaan tafsir antar tim Pembangunan Zona Integritas terkait rekomendasi Kemenpan RB	tidak ada perbaikan kondisi atas rekomendasi Kemenpan RB
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH						

19	Manipulasi data e-kinerja pegawai ASN	ROO.2025.99.04.49	9	Sub Bag Adum	1. Kurangnya Integritas Pegawai. 2. Pembeneran bahwa tindakan tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan banyak dilakukan oleh orang lain. 3. Tekanan ekonomi	1. Dampak Kerugian Keuangan Daerah 2. Dampak Budaya yang tidak Baik 3. Target kinerja tidak tercapai 4. Reputasi Institusi tidak baik
20	Keterlambatan proses pengadaan	ROO.2025.99.04.57	9	Sub Bag Adum	Keterlambatan penyusunan dokumen pengadaan/persyatan dokumen pengadaan	Pemanfaatan barang yang kurang optimal
21	Penyalahgunaan BMD untuk kepentingan pribadi	ROO.2025.99.04.61	9	Sekretaris	1. Kurangnya pemantauan terhadap pemakai BMD 2. Pembeneran bahwa tindakan tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan banyak dilakukan oleh orang lain.	1. Dampak Kerugian Keuangan Daerah 2. Dampak Budaya yang tidak Baik

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan/ RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian
(RTP atas CEE)**

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga
Tahun Penilaian : 2025

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
I PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF					
1	<p>a. Masih terdapat temuan atas LHP BPK terkait Pengamanan Aset Daerah yang masih berulang atau belum tuntas</p> <p>b. Pemantauan atas RTP belum dilakukan secara berkala/periodik, sebagian besar sebatas jika ada instruksi/arahan. Penilaian risiko fraud belum sepenuhnya menghasilkan peta risiko korupsi</p>	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Aset, Persediaan, dan Kas Opname pada Perangkat Daerah	Irbanwil 1, 2, 3	Januari 2025	
		Reviu Rencana Tindak Pengendalian OPD Tahun 2025 dan Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 2024	Irbanwil 1, 2, 4	Maret 2025	
		Pendampingan Penilaian Risiko Kecurangan	Irbansus	Januari 2025	
		Reviu Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Tahun 2025	Irbanwil 1, 2, 3 dan Irbansus	Tribulan II dan III	
	<p>a. Pelaksanaan Audit Ketaatan (Compliance Audit) belum sepenuhnya menyusun/ mengembangkan langkah kerja pengawasan yang mempertimbangkan risiko-risiko strategis yang ada pada objek pengawasan</p> <p>b. Jasa Konsultasi yang diberikan Inspektorat belum seluruh nya mengarah pada pembunaa kepada perangkat daerah yang masih memiliki tingkat kematangan MR yang rendah maupun perangkat daerah yang belum memiliki Register Risiko/Profil Risiko, sehingga layanan konsultasi belum mampu memberikan perbaikan terhadap pengelolaan risiko di Lingkungan Pemkab Purbalingga</p>	Peningkatan Kapasitas SDM APIP dengan melaksanakan Diklat, Bimtek dan <i>Inhouse Training</i>	Sekretaris	Semester 1 dan 2	

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)**

Nama Pemda		Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga				
Tahun Penilaian		2025				
Tujuan Strategis		Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Pemerintah Daerah				
Urusan Pemerintahan		Urusan Pengawasan				
No	Risiko Prioritas	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	d	e	f	g	h
I Risiko Strategis						
1	OPD Belum memetakan Potensi Kecurangan / Potensi terjadinya Korupsi	Perbup Pedoman Pengelolaan Risiko, Perbup Pengendalian Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani risiko teridentifikasi	Pendampingan identifikasi potensi kecurangan	Irbansus	Januari 2025
2	OPD dan Pemda terlambat dalam melaksanakan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi	1. Telah dilaksanakan Sosialisasi Penilaian Mandiri SPIP 2. Telah dibentuk Tim Asesor OPD dan Pemda 3. Telah dibentuk Satgas SPIP	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani risiko teridentifikasi	Pendampingan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi	Irbansus II	April 2025
3	Keterlambatan Obrik dalam penyelesaian tidak lanjut Hasil Pemeriksaan	Telah disusun Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Kabupaten Purbalingga	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani risiko teridentifikasi	Pendampingan dan Konsultasi Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan	Irbansus I, II, III Sekretariat	Setiap bulan
4	Pemantauan atas Rencana Tindak Pengendalian Risiko Fraud belum dilaksanakan secara berkala	Perbup Pedoman Pengelolaan Risiko, Perbup FCP	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani risiko teridentifikasi	Evaluasi atas Rencana Tindak Pengendalian risiko <i>fraud</i> OPD	Irbansus	Tribulan I

5	Pegawai tidak memanfaatkan saluran whistleblowing karena masih tidak percaya mekanisme perlindungan pelapor berjalan	Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Pengaduan (<i>Whistle Blowing System</i>) Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Purbalingga	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani risiko teridentifikasi	Sosialisasi Perbup Pedoman Penanganan Pelaporan Pengaduan	Irbansus	Februari 2025
II Risiko Operasional						
PENGAWASAN INTERNAL						
6	Dokumen Pendukung Pengawasan Kinerja tidak dapat diperoleh tepat waktu	Koordinasi intensif dengan OPD Terkait sebelum pemeriksaan dilaksanakan	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Mendorong partisipasi aktif pimpinan auditee selama proses pengawasan kinerja	Irbansus, Tim Pemeriksa	Setiap awal penugasan
7	Keterlambatannya Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Keuangan	Pemantauan secara berkala Progres Penyelesaian LHP Secara Online	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Mengirimkan peserta Diklat terkait pengawasan keuangan	Irbansus, Inspektur	Semester 1
8	Ketidaksesuaian dokumen tindak lanjut dengan Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK/APIP	Telah disusun Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Kabupaten Purbalingga	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pendampingan/ desk pada OPD tindak lanjut hasil pemeriksaan	Sub Bagian Analisis dan Evaluasi	Triwulan IV
9	Keterlambatannya Penyusunan LH Pengawasan Kinerja	1. Pemantauan secara berkala Progres Penyelesaian LHP Secara Online 2. SOP dan Standar Pelayanan Pengawasan Keuangan	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Mengirimkan peserta diklat audit kinerja	Inspektur	Semester 1
10	Rekomendasi hasil pengawasan laporan kinerja tidak tepat	1. Reviu berjenjang oleh pimpinan 2. SOP dan Standar Pelayanan Pengawasan Kinerja	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Peningkatan kompetensi bagi tim pemeriksa/auditor	Sekretaris	Triwulan I, II, III
11	Dokumen pendukung kegiatan pengawasan keuangan tidak didapatkan tepat waktu	1. Pemantauan secara berkala Progres Penyelesaian LHP Secara Online 2. SOP dan Standar Pelayanan Pengawasan Keuangan	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Mendorong partisipasi aktif pimpinan auditee selama proses pengawasan keuangan	Tim Pemeriksa	Setiap awal penugasan

PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						
12	Tingginya beban kerja APIP	Anjab dan ABK	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Menyusun roadmap pemenuhan SDM APIP sesuai dengan rekomendasi/anjab ABK dan menyampaikan usulan pemenuhan SDM APIP ke Pusati	Tim Peningkatan Kapabilitas APIP	Triwulan II
13	Evidence SPIP yang tidak sesuai	1. Telah dibentuk Tim Asesor OPD dan Pemda 2. Rapat Koordinasi	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Menyusun daftar Evidence pemenuhan PM SPIP	Tim Pendampingan SPIP	Triwulan II
14	Ketidaksesuaian Rencana Aksi dengan Rekomendasi Hasil evaluasi maupun dengan Indikator Kegiatan Utama General dan tema tematik	1. telah dibentuk Tim RB Kabupaten 2. Rapat Koordinasi	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pendampingan/ desk penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB)	Irbawil I	Triwulan II
15	Ketidaksesuaian dokumen Pendukung/ Evidence Penilaian Mandiri Zona Integritas	1. terdapat tim pembangunan zona Integritas Unit Kerja 2. Telah dibentuk Tim Penilai Internal	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pendampingan Persiapan Penilaian Zona Integritas	Irbansus	Februari 2025
16	OPD tidak segera melaksanakan Perbaikan/tindak lanjut atas rekomendasi Kemenpan RB	1. terdapat tim pembangunan zona Integritas Unit Kerja 2. Telah dibentuk Tim Penilai Internal	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Peningkatan Kapasitas Tim Penilai Internal dan Tim Pembangunan zona Integritas Unit	Irbansus	Maret 2025
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
17	Manipulasi data e-kinerja pegawai ASN	1. PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. 2. Perbup No. 36 Tahun 2022 tentang TPP. 3. Bukti penugasan individu bulanan	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Penegakan Sanksi Disiplin PNS. 2. Penguatan integritas pegawai melalui rapat internal secara rutin 3. Pemberian reward	Sekretaris	Setiap Bulan
18	Keterlambatan proses pengadaan	1. Penunjukan Pejabat Pengadaan 2. Terdapat Rencana Umum Pengadaan	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Rapat Koordinasi rencana pengadaan	Pejabat Pengadaan dan Ppkom	Triwulan I

19	Penyalahgunaan BMD untuk kepentingan pribadi	<ol style="list-style-type: none">1. Perbup No. 71 Tahun 2020 tentang pengelolaan BMD2. SK Pemegang BMD3. Pakta Integritas4. Labelling BMD setiap semesteran5. KIR6. KIB7. BA Serah Terima Aset8. Rekon Aset	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyusunan Pakta Integritas pemegang Barang Milik Daerah	Inspektur	Triwulan I
----	--	---	---	--	-----------	------------

Nama Pemda	Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga
Tahun Penilaian	2025
Tujuan Strategis	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
Urusan Pemerintahan	Urusan Pengawasan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Pendampingan identifikasi potensi kecurangan	Rapat /FGD	Inspektorat Daerah,	OPD Terkait, Tim Pendampingan	Januari 2025		
2	Pendampingan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi	Rapat /FGD	Inspektorat Daerah,	Asesor Pemda, Asesor OPD, Satgas SPIP, Tim PK atas PM SPIP	April 2025		
3	Pendampingan dan Konsultasi Penyelesaian Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan	Rapat /FGD	Tim Tindak Lanjut, Inspektorat Daerah	OPD Terkait, Tim Monitoring Tindak Lanjut	Setiap bulan		
4	Evaluasi atas Rencana Tindak Pengendalian risiko fraud OPD	Rapat/ FGD	Inspektorat Daerah	OPD Terkait, Tim Evaluasi RTP	Tribulan I		
5	Sosialisasi Perbup Pedoman Penanganan Pelaporan Pengaduan	Rapat/ FGD/ Surat	Inspektorat Daerah	OPD Terkait,PAKSI	Februari 2025		
6	Mendorong partisipasi aktif pimpinan auditee selama proses pengawasan kinerja	Rapat/ FGD/ Surat	Inspektorat Daerah	OPD Terkait, Tim Audit	Setiap awal penugasan		
7	Mengirimkan peserta Diklat terkait pengawasan keuangan	Rapat	Inspektorat Daerah	Tim Pemeriksa	Triwulan I, II, III		
8	Pendampingan/ desk pada OPD tindak lanjut hasil pemeriksaan	Rapat/ FGD	Inspektorat Daerah	OPD Terkait, Tim Monitoring Tindak Lanjut	Setiap awal penugasan		
9	Mengirimkan peserta diklat audit kinerja	Rapat	Inspektorat Daerah	Tim Pemeriksa	#REF!		
10	Peningkatan kompetensi bagi tim pemeriksa/auditor	Rapat/ FGD/ Diklat	Inspektorat Daerah	Tim Pemeriksa	Triwulan II		
11	Mendorong partisipasi aktif pimpinan auditee selama proses pengawasan keuangan	Rapat/ FGD/ Surat	Inspektorat Daerah	OPD Terkait	Triwulan II		
12	Menyusun roadmap pemenuhan SDM APIP sesuai dengan rekomendasi/anjak ABK dan menyampaikan usulan pemenuhan SDM APIP ke Bupati	Rapat	Inspektorat Daerah	Kepala Daerah, OPD Terkait, Tim Kapabilitas APIP	Maret 2025		

13	Menyusun daftar Evidence pemenuhan PM SPIP	Rapat/ FGD/ Surat	Inspektorat Daerah,	Tim Satgas SPIP Kabupaten	Triwulan II		
14	Pendampingan/ desk penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB)	Rapat/FGD	Inspektorat Daerah	OPD Terkait, Tim Evaluator RB	Triwulan II		
15	Pendampingan Persiapan Penilaian Zona Integritas	Rapat/FGD	Inspektorat Daerah	OPD Terkait, Tim Penilai Internal	Februari 2025		
16	Peningkatan Kapasitas Tim Penilai Internal dan Tim Pembangunan zona Integritas Unit Kerja	Rapat/FGD/ Bimtek	Instansi Pengampu	Tim Penilai Internal, Tim Pembangunan Zona Integritas, OPD Terkait	Maret 2025		
17	1. Penegakan Sanksi Disiplin PNS. 2. Penguatan integritas pegawai melalui rapat internal secara rutin 3. Pemberian reward 4. Evaluasi Berjenjang	Rapat/ Surat	Inspektorat Daerah	Pegawai Inspektorat Daerah	Setiap Bulan		
18	Rapat Koordinasi rencana pengadaan	Rapat	Inspektorat Daerah	Tim Pengelola Keuangan, Pejabat Pengadaan,	Triwulan I		
19	Penyusunan Pakta Integritas pemegang Barang Milik Daerah	Rapat/ Surat	Inspektorat Daerah	Pemakai BMD, Pengurus Barang	Triwulan I		